

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH**

(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

INDRIA RENTIKA

NIM : 1107549

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH
(*Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang*)

Oleh :

Indria Rentika
1107549/2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 108
25 maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 10 Februari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Svofyan, SE, M.Si, Ak

NIP: 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Erly Mulvani, SE, M.Si, Ak

NIP: 19781204 200801 2 011

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH (STUDI
EMPIRIS PADA SKPD DI KOTA PADANG)**

Indria Rentika

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: indriarentika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pemerintah pada seluruh SKPD yang ada di Kota Padang. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner di seluruh SKPD yang ada di Kota Padang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 SKPD yang dibagi ke dalam dua responden untuk masing-masing SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi, (2) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi, (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kinerja Organisasi

ABSTRACT

The research methode to determine the effect of implementation e Good Governance, Utilization of Information Technology, and Internal Control System of Government Performance Against Organizations at all SKPD in Padang City. The research data were obtained through the deployment questioner throughout SKPD in Padang city. This research included the study of causative. The population of this study were all SKPD in Padang city. The sampling technique used was purposive sampling. The number of samples in this study were 41 SKPD divided into two respondents for each SKPD. The results showed that: (1) Good Governance positive significant effect on organizational performance, (2) Utilization of information technology does not affect the organizational performance, (3) Internal control system positive significant effect on organizational performance.

Keywords: *Good Governance, Utilization of Information Technology, Internal Control Government System and Organizational Performance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang luas, dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini tentu membutuhkan pemerintahan yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat tersebut. Pemerintahan yang baik harus didukung dengan kinerja yang baik pula dari unsur manusia/aparatur pemerintahnya.

Kinerja organisasi yang baik merupakan unsur penting dalam penerapan pemerintahan yang baik pula. Kinerja organisasi merupakan gambaran dari bagaimana kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin baik kinerja organisasi maka semakin baik pula kinerja aparatur negara. Peningkatan kinerja organisasi terbentuk karena adanya sejumlah variabel pendukung seperti adanya sistem pengendalian dan pelaksanaan sistem tata kelola yang tepat didalam organisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut agar selalu tanggap terhadap keadaan tuntutan lingkungannya. Banyak SKPD pada saat ini mengalami penurunan kinerja akibat menurunnya kinerja pegawai dan tidak berjalannya model tata kelola yang sehat dan dinamis didalam pemerintahan atau disebut dengan *good governance*.

Faktor yang dapat meningkatkan kinerja organisasi adalah *Good governance*. *Good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Pemerintah akan berusaha melaksanakan

sebaik-baiknya pembangunan pelayanan sektor publik kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan menilai baik kinerja organisasi sektor publik tersebut (Mardiasmo dalam Supriadi, 2014). *Good governance* merupakan standar tata kelola didalam sebuah pemerintahan. Selain itu *good governance* berusaha mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.

Permasalahan mengenai kinerja organisasi dan *Good Governance* pada SKPD Kota Padang masih seputar pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Sumbar memberi rapor merah terhadap enam dari sembilan SKPD yang dinilai masih belum bisa melaksanakan kinerja yang baik dan masih buruknya dari pelayanan publik. Diketahui, Ombudsman merilis dari 9 SKPD Padang yang diteliti selama 2015, enam di antaranya masuk zona merah, satu zona kuning, hanya dua SKPD berada di zona hijau. Adapun SKPD yang mendapat raport merah tersebut, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika (Dishubkominfo), Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Masih banyak SKPD di Padang yang belum paham atau belum mau menerapkan standar pelayanan publik. Dari enam SKPD yang mendapat raport merah itu, sebagian besar bersentuhan langsung dengan masyarakat (<http://padangmedia.com>).

Enam dari sembilan satuan yang mendapat rapor merah di bidang pelayanan publik memang belum memiliki standar pelayanan yang jelas. Standar pelayanan publik (SPP) belum ada. Oleh karenanya Komisi I akan mendorong lahirnya Perda Pelayanan Publik. Setiap SKPD diwajibkan memiliki SPP. Standar pelayanan ini mesti diterapkan jika satuan ingin berbenah diri untuk melakukan kinerja yang bagus. Kinerja Pemko akan dinilai dari pelayanan satuan kerja. Bila pelayanan bagus baru satuan kerja dapat diacungkan jempol. Kecuali kalau tidak mau menyiapkan pelayanan dan tidak berkeinginan menyukseskan reformasi birokrasi. Jika ingin, pelayanan publik harus di nomor satukan (<http://padangmedia.com>).

Senada dengan keinginan masyarakat luas, sesungguhnya pemerintah dituntut memberikan suguhan pelayanan terbaik, diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kekuatan birokrat yang kuat. Kuat dalam arti memiliki kekuasaan dibidang pelayanannya dan kemampuan masing-masing, sehingga pada akhirnya akan diikuti perubahan mental masyarakat pengguna layanan birokrat tadi dengan kataatan terhadap peraturan dan hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Demikian akan terjadi simbiosis muatalistik diantara penyelenggara pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta produktifitas semua bidang atas

dampak positif kinerja aparatur pemerintah tadi.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif (Chintya, 2015).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Sistem pengendalian intern pemerintah juga dapat menentukan kinerja organisasi pemerintah.

Pengendalian intern merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha & Frederick dalam Azlina & Amelia, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

Permasalahan teknologi informasi pada SKPD kota Padang adalah masih kurangnya penggunaan sistem informasi pada pengelolaan aset negara, hal ini juga berdampak pada sistem pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak terlepas dari pengelolaan aset negara, baik berupa barang maupun dalam bentuk laporan keuangan, harus menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah kelancaran pekerjaan. Untuk itu pemerintah Kota Padang sedang giat-giatnya mensosialisasikan Sistem

Informasi Manajemen Daerah. Langkah Pemko Padang untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah melakukan pengelolaan aset berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah, Barang Milik Daerah (Simda-BMD), bekerja sama dengan BPKP sebagai owner dari Simda BMD-nya. Tujuannya agar pengelolaan aset dapat menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Maka diperlukan suatu sistem pengolah data pengelolaan barang dan aset Pemerintah daerah. Salah satunya dengan membangun sistem informasi manajemen daerah, barang milik daerah (Sinda-BMD). Jadi, dengan sistem informasi manajemen daerah, barang milik daerah Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk memajukan manajemen kota terutama aspek administrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. (<http://dpka.padang.go.id>).

Permasalahan mengenai teknologi informasi ini tentu akan berdampak pula pada sistem pengendalian intern pemerintah karena jika para pegawai lambat dalam mengelola aset negara baik itu berupa barang maupun dalam bentuk laporan keuangan tentu akan mendapat rapor merah dari DPRD. Dan Langkah Pemko Padang untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI akan urung terjadi. Permasalahan ini tentu akan berdampak terhadap kinerja organisasi karena untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dan pemerintahan yang baik diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi di SKPD Kota Padang dan membahas lebih lanjut ke dalam skripsi

yang berjudul **Penerapan *Good governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)**.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh *good governance* terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.
2. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.
3. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *good governance* terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pada SKPD di Kota Padang.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak pengelola SKPD hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam mengambil kebijakan strategis yang tentunya akan mendorong meningkatnya

kinerja organisasi dimasa mendatang.

2. Praktisi, hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna untuk mengambil berbagai kebijakan yang dilandasi pada tata kelola perusahaan yang baik, efektifitas penggunaan teknologi dan adanya teknologi pengendalian intern yang berjalan.
3. Akademisi, hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1) Kinerja Organisasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Pasolong (2007:175) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut Prawirosentoso dalam Pasolong (2007:176) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja organisasi merupakan gabungan dari sejumlah kinerja yang telah dicapai oleh setiap anggota (*individual performance*) didalam sebuah organisasi (Robbins dan Timothy,

2010:231). Menurut Bastian (2006:329), pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Mahmudi (2008:14) tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah :

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Mahmudi (2008:21) kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

- 1) Faktor Personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*
- 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim
- 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi

- 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto (2008:52-53) menggunakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja organisasi sektor publik, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi
- 2) Efektivitas
- 3) Keadilan
- 4) Daya tangkap

Menurut Bastian (2006:333), Indikator dalam mengukur kinerja adalah :

- 1) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Indikator masukan mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

- 2) Indikator Proses (*Process*)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.

- 3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengatur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan

dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran. Indikator *outcome* lebih utama dibandingkan output. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

3. *Good Governance*

Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik), wujud dari *good governance* adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012:2). Konsep *good governance* dari segi fungsional, aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi (Sedarmayanti, 2012:4).

Syakrani (2008:57) menyebutkan ada banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance*. Faktor-faktor tersebut ada yang dapat menunjang terwujudnya *good governance* tapi ada juga yang menghambat terwujudnya *good governance*. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Faktor Pendukung :

- a) Masyarakat suatu negara menghormati hukum.
- b) Aparat pemerintahan yang bersih, bermoral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta *check and balances*.
- c) Amandemen UUD 1945 sebagai contoh pada pasal 28F, mengatur kewajiban pemerintahan untuk memberi informasi (penunjang prinsip *good governance* yaitu transparansi).

2) Faktor Penghambat

- a) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai *good governance* sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka.
- b) Kualitas SDM untuk mewujudkan *good governance* yang kurang.
- c) Penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* yang belum terlaksana secara maksimal.

Indikator dalam menilai *good governance* (Mardiasmo, 2009:18) adalah :

1) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangbulu.

3) Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

4) Daya tanggap

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) Orientasi konsensus

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) Berkeadilan

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) Efisiensi dan efektifitas

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

9) *Strategic vision*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari Sembilan indikator tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) (Mardiasmo, 2009:18).

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut *Information Technology Association of America* dalam Sutarman (2009:13), teknologi informasi (TI) adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991)

dalam Chintya (2015) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Siregar dan Suryanawa, 2010).

Departemen sistem informasi dapat dibagi menjadi lima fungsi utama (Bodnar dan Hopwood, 2006), yaitu:

- 1) Fungsi analisis bertugas mengidentifikasi masalah dan proyek untuk mendesain sistem yang dapat menyelesaikan masalah.
- 2) Fungsi pemrograman bertanggung jawab untuk mendesain, membuat kode, menguji, dan mendebug program komputer yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang telah dirancang oleh analis.
- 3) Fungsi operasi bertanggung jawab menyiapkan data, mengoperasikan peralatan, dan memelihara sistem.
- 4) Fungsi *technical support* bertanggung jawab dengan sistem operasi, perangkat lunak, desain database, pengelolaan data, dan teknologi komunikasi.
- 5) Fungsi *user support* bertugas melayani pengguna, serupa dengan fungsi *technical support* yang bertugas melayani personel di departemen sistem informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi (Amalia, 2010) sebagai berikut:

1) Faktor sosial

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seseorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi.

2) *Affect* (perasaan individu)

Affect (perasaan individu) dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak

menyenangkan dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Kesesuaian tugas

Kesesuaian tugas mengukur sejauh mana seseorang individual percaya bahwa menggunakan teknologi komputer personal dapat meningkatkan kinerja dari pekerjaannya. Tugas didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual-individual untuk merubah *input* menjadi *output* (Siregar dan Suryanawa, 2008).

4) Konsekuensi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti, meningkat keluwesan untuk mengganti pekerjaan-pekerjaan. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini.

5) Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektivitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Jurnal dan Supono (dalam Chintya, 2015) pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan menggunakan sejumlah indikator yang meliputi:

- a) Kuantitas komputer.
- b) Pemanfaatan jaringan komputer.
- c) Proses yang terkomputerisasi.
- d) Sistem informasi yang terintegrasi.
- e) Software yang terintegrasi.
- f) Peralatan.

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Konsep sistem pengendalian intern diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 pasal (1) ayat (1), sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal (1) ayat (2) .

Menurut Murwanto (2012:208), alasan-alasan mengapa hanya dapat memberikan keyakinan memadai karena pengendalian intern memiliki kelemahan melekat pada sistem informasi dan pengendalian intern entitas karena hal-hal berikut:

1) Biaya versus manfaat

Biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat-manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut.

2) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, seperti untuk keuntungan pribadi atau pemerindah penyajian kinerja organisasi

3) Kesalahan-kesalahan dalam melakukan pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan pegawai melakukan pertimbangan yang buruk dalam mengambil keputusan-keputusan atau dalam melakukan tugas rutin karena keterbatasan informasi, waktu atau tekanan-tekanan lain.

4) Kolusi

Para pegawai yang secara bersama-sama (seperti pegawai yang melakukan pengendalian yang penting bersama-sama dengan pegawai atau rekanan lain) dapat menembus dan menutupi ketidakberesan sehingga tidak dapat dideteksi dengan sistem informasi dan pengendalian intern.

5) Kegagalan sistem

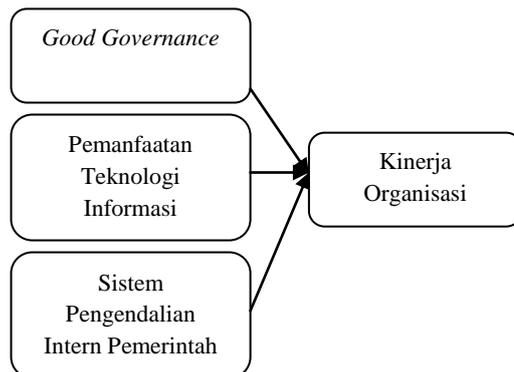
Kegagalan dalam pengendalian-pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena pegawai tidak memahami instruksi atau membuat kesalahan karena kecerobohan, kealpaan atau kelelahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa SPIP dapat diukur dengan :

- a) Lingkungan Pengendalian.
- b) Penilaian Risiko.
- c) Kegiatan Pengendalian.
- d) Informasi dan Komunikasi.
- e) Pemantauan Pengendalian Intern.

B. Kerangka Konseptual

Untuk melihat keterkaitan antar variabel, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian kausatif, menurut Husein (2011:35), penelitian kausatif (kausal) berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara variabel bebas yaitu *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap variabel terikat yaitu kinerja organisasi. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja organisasi pada seluruh SKPD Kota Padang.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61). Oleh sebab itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Padang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:62). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam metode tersebut sampel diambil berdasarkan kriteristik yaitu individu

yang bekerja dibagian akuntansi dan keuangan dan telah bekerja lebih kurang satu tahun. Masing masing SKPD memiliki jumlah anggota yang beragam atau tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu yang menjadi responden adalah pegawai yang bekerja dibagian keuangan pada masing masing SKPD yaitu lebih kurang berjumlah 82 orang dimana setiap SKPD 2 orang bagian keuangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian pada instansi pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner kepada kepala SKPD dan Kasbid Keuangan masing-masing SKPD di Kota Padang.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen (Variabel terikat) dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi.
2. Variabel independen (Variabel bebas) dalam penelitian ini adalah:
 - a. *Good Governance*
 - b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat 1 (Tidak Setuju=STS) , 2 (Tidak Setuju=TS), 3 (Netral=N), 4 (Setuju=S), 5 (Sangat Setuju=SS).

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk menguji dan mencari validitas dari angket penulis menggunakan program SPSS. Dengan mendeteksi nilai *Corrected Item Total Correlation*. Dengan kriteria pengujian: Jika r hitung $>$ r tabel maka angket dikatakan tidak valid atau dengan mendeteksi nilai *Corrected Item Total Correlation* hasil *output* SPSS. Jika nilai *Corrected Item Total Correlation* yang diperoleh lebih besar dari r tabel dengan nilai 0,2172 (82 sampel) untuk tiap pernyataan lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, kestabilan/konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu atas kelompok individu walaupun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Cronbach Alpha*.

H. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan penelitian asumsi klasik terhadap data yang akan digunakan, uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data (Idris, 2014:72). Digunakan untuk mengetahui apakah data variabel independen dan data variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Normal atau tidaknya distribusi data dapat dilihat dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Idris (2014:81), distribusi data dikatakan normal jika nilai signifikan $>$ 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Sebelum melakukan analisis dengan regresi berganda maka sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu uji multikolinearitas. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS, berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen, jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas dan harus diatasi. Jika nilai VIF < 5, maka tidak terdapat multikolinearitas, jika VIF > 5, maka variabel tersebut mempunyai multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3) Uji Heterokedastisitas

Asumsi Heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain (Idris, 2014:87). Dalam uji ini, apabila penyebaran plot tidak teratur atau terpecah dan tidak membentuk pola tertentu maka persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

I. Metode Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah persamaan dengan kemungkinan yang mendekati kenyataan antara variabel yang ada dan untuk mengukur pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat, dengan menggunakan SPSS, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Organisasi

X₁ = *Good Governance*

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ = Sistem Pengendalian Intern

a = Variabel Pengganggu

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

e = *Error*

b. Uji Kelayakan Model

1) Uji F

Uji F penerapannya digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Seberapa pengaruhnya ditentukan oleh hasil pengujian ini.

Dapat juga dengan menggunakan SPSS dengan kriteria menurut Idris (2014:54) adalah:

- Jika nilai pada kolom signifikan < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika nilai pada kolom signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dimana nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2005:83). Nilai dari R² berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R² bergerak mendekati 1 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. Dan jika dalam perhitungan nilai R² sama dengan 0 maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen.

3) Uji T (Hipotesis)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Idris (2014:54), kriteria keputusannya adalah:

- Jika nilai pada t_{hit} > t_{tab} atau signifikan < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau H₀ ditolak dan H_a diterima.
- Jika nilai t_{hit} < t_{tab} atau signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas

dengan variabel terikat atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

J. Defenisi Operasional

1. Kinerja Organisasi

kinerja organisasi adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik atau buruknya kinerja suatu organisasi tergantung kepada program dan kegiatan yang dilakukan oleh para anggota atau pegawainya.

2. *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola organisasi yang baik. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan penataan dan pengelolaan yang maksimal oleh anggotanya.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga diharapkan dengan teknologi informasi yang diterapkan dapat menunjang hasil pekerjaan yang lebih baik.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SIPI adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek. Setiap sampel masing-masing terdiri dari 2 responden yaitu Kepala SKPD, Kepala Bidang Keuangan pada masing-masing SKPD di Kota Padang. Dimana terdapat 41 SKPD yang terdapat di Kota Padang dan kuesioner disebarikan sebanyak 82 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang berhasil diterima sebanyak 82 kuesioner.

B. Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian data statistik, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja organisasi

Sebelum melakukan pengujian data statistik, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja organisasi.

C. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk menguji dan mencari validitas dari angket penulis menggunakan program SPSS. Dengan mendeteksi nilai *Corrected Item Total Correlation*. Dengan kriteria pengujian: Jika r hitung $>$ r tabel maka angket dikatakan tidak valid atau dengan mendeteksi nilai *Corrected Item Total Correlation* hasil *output* SPSS. Jika nilai *Corrected Item Total Correlation* yang diperoleh lebih besar dari r tabel dengan nilai 0,2172 (82 sampel) untuk tiap pernyataan lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid.

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa nilai terkecil dari *Corrected Item- Total Correlation* untuk masing-masing instrumen kinerja organisasi diketahui nilai *Corrected Item- Total Correlation*

terkecil 0,366, untuk instrumen *good governance* diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,225, untuk instrumen pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,518, untuk sistem pengendalian intern pemerintah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,245. Berdasarkan penjelasan diatas, semua variabel diatas 0,2172, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ (Nurmally dalam Ghozali, 2006:41). Jika menggunakan bantuan SPSS, uji reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha dari *cronbach*.

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian telah reliabel sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Analisis uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampel dari data sampel mendekati normalitas populasi. Alat uji yang dipergunakan adalah *One Sampling Kolmogorov Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp sig (2- tailed) > $\alpha = 5\%$* . Apabila uji normalitas telah terpenuhi, maka tahapan pengujian hipotesis selanjutnya dapat dilanjutkan. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah :

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa nilai *Asymp sig (2-tailed)* variabel kinerja organisasi sebesar $0,066 > \alpha 0,05$, untuk variabel *good governance* sebesar $0,217 > \alpha 0,05$, untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar $0,186 > \alpha 0,05$, dan untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah

sebesar $0,295 > \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai *asyp sig. > alpha* maka data sudah terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan kepada pengujian hipotesis selanjutnya.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance > 0,1* dan $VIF < 10$, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya.

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa kolom *collinearity statistic* yaitu pada kolom VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

3. Uji Heterokedestisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, apabila penyebaran plot tidak teratur atau terpecah dan tidak membentuk pola tertentu maka persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa penyebaran plot terjadi secara acak dan tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

E. Hasil Penelitian

1. Model Data

a. Model

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan

OLS (*Ordinal Least Square*) atau metode kuadrat terkecil yang dibentuk oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan bantuan program SPSS versi 16.0.

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 4,865 + 0,519X_1 + 0,084X_2 + 0,416X_3 + 3,465$$

Nilai konstanta (a) dalam penelitian ini adalah sebesar 4,865 yang artinya jika tidak memperhatikan variabel independen yang terdiri dari *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah maka variabel dependen yang terdiri dari kinerja organisasi sudah mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi (b_1) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,519 yang memiliki nilai positif, yang artinya bahwa variabel *good governance* berbanding lurus dengan kinerja organisasi dimana setiap peningkatan *good governance* maka akan ikut meningkatkan kinerja organisasi.

Nilai koefisien regresi (b_2) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,084 yang memiliki nilai positif, yang artinya bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berbanding lurus dengan kinerja organisasi dimana setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi maka akan ikut meningkatkan kinerja organisasi. Nilai koefisien regresi (b_3) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,416 yang memiliki nilai positif, yang artinya bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berbanding lurus dengan kinerja organisasi dimana setiap peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan ikut meningkatkan kinerja organisasi.

b. Uji Model

1) Uji F

Pengujian f-statistik bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri dari *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel dependen yang terdiri dari kinerja organisasi.

Pada tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat alpha yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu 5% atau 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap kinerja organisasi.

2) Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) ditujukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan kontribusinya mempengaruhi variabel dependen yang diukur dengan persentase sedangkan sisa kontribusi lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model.

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,520. Hal ini berarti bahwa besarnya kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 52%, sedangkan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel pada model penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

Uji t parsial bertujuan untuk membuktikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t parsial dimana nilai signifikansi $< \alpha$ 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama seperti yang terlihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel *good governance* adalah sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05 maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai dari koefisien β pada variabel *good governance* adalah bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua seperti yang terlihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar $0,532 > \alpha$ 0,05 maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga seperti yang terlihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05 maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai dari koefisien β pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

F. Pembahasan

1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel *good governance* adalah sebesar $0,000 < \alpha$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Maka dapat diartikan bahwa, semakin tinggi *good governance* maka dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Ery Supriadi, Nyoman Trisna Herawati dan I Made Pradana Adiputra (2014), dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh variabel *good governance* terhadap kinerja organisasi.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar $0,532 > \alpha$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Maka dapat diartikan bahwa adanya atau tidaknya pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adif Putra Zodia (2015) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja organisasi.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel

sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel variabel pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Maka dapat di artikan bahwa, semakin baiknya sistem pengendalian intern pemerintah, maka dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Ery Supriadi, Nyoman Trisna Herawati dan I Made Pradana Adiputra (2014), Irine Chintya (2015), Nur Azlina dan Ira Amelia (2014), Argo Trihapsoro (2015), dan Adif Putra Zodia (2015) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh variabel pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan :

- 1 Variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.
- 2 Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
- 3 Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti selalu berusaha dalam menyempurnakan penelitian ini, akan tetapi terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel *good*

governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Adanya banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi kinerja organisasi.

2. Analisa dalam penelitian ini hanya berdasarkan penyebaran kuesioner, tidak menggunakan metode analisis lain seperti melakukan wawancara kepada setiap SKPD.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang ada, untuk meningkatkan kinerja organisasi maka terdapat beberapa saran-saran yang bisa dijadikan referensi bagi pihak SKPD yang ada di Kota Padang agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Sebaiknya seluruh SKPD yang ada di Kota Padang harus lebih memperhatikan setiap kebebasan masyarakat dalam mengakses Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang telah dipublikasikan agar SKPD lebih transparan dalam mengelola setiap kegiatan yang ada di pemerintahan.
2. Sebaiknya seluruh SKPD yang ada di Kota Padang harus lebih memperhatikan pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan akuntansi dan manajerial harus dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, dan peralatan yang using/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya agar dapat meningkatkan kinerja dari setiap SKPD yang ada di Kota Padang.
3. Sebaiknya seluruh SKPD yang ada di Kota Padang harus lebih memperhatikan setiap evaluasi yang dilakukan oleh instansi terhadap kinerja pegawai secara

berkesinambungan, dan pemahaman pegawai tentang adanya kebijakan bahwa informasi instansi harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan kepada para pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat agar lebih efisien dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2010. *“Statistik 1”*. Padang: UNP Press.
- Amalia, Soraya. 2010. *“Persepsi Pegawai Pajak terhadap Pemanfaatan teknologi Informasi pada Kinerja Individual (Studi Kasus pada KPP Pratama Tegal)”*. Universitas Diponegoro.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *“Prosedur Penelitian Edisi Revisi VI.”* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azlina Nur dan Ira Amelia. 2014. *“Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan”*. *Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 2*. Universitas Jember.
- Bodnar, George H, and William S.Hopwood. 2006. *“Sistem Informasi. Akuntansi”*,_Buku I. Jakarta: Penerbit salemba empat.
- Chintya, Irine. 2015. *“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok”*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *“Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *“Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik”*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ghazali Imam. 2005. *“Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS.”* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. 2011. *“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua.”* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Idris. 2014. *“Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS. Edisi Revisi IV.”* Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Lindawati dan Irma Salamah. 2012. *“Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Penegaruhnya Terhadap Kinerja Individual Karyawan.”* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 14 No 1 Mei 2010*.
- Mahmudi. 2008. *“Manajemen Kinerja Sektor Publik.”* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *“Akuntansi Sektor Publik.”* Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. 2010. *“Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5.”* Jakarta : Salemba Empat.
- Murwanto, Rahmadi. 2012. *“Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah”*. LPKPAP.
- Pasolong, Harbani. 2007. *“Teori Administrasi Publik.”* Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. *“Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik.”* Yogyakarta : Universitas Bina Darma.
- Robbins, Stephen P & Timothy A Judge. 2010. *“Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour) Edisi 12.”* Diterjemahkan Oleh Diana Angelica. Jakarta. Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2012. *“Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi”.* Bandung : CV Mandar Maju.
- Siregar, Astuti Handaiyani dan suryanawa. 2008. *“Pemanfaatan teknologi informasidan pengaruhnya terhadap kinerja individual pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat.”* Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2010. *“Statistika Untuk Penelitian.”* IKAPI. Penerbit : Alfabeta Bandung.
- Supriyadi, Ida Bagus Putu. Nyoman Trisna Herawati dan I Mafe Pradana Adiputra. 2014. *“Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behaviour dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi”.* E Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No 1 Tahun 2014.
- Sutarman. 2009. *“Pengantar Teknologi Informasi. Edisi I.”* Jakarta : Bumi Aksara.
- Syakrani & Syahriani. 2009. *“Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance”.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Trihapsoro, Argo. 2015. *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Williams, Brian K & Sawyer Stacey C. 2005. *“Using Information Technology Practical Introduction to Computers & Communications.”* McGraw Hill, New York, USA.
- Zodia, Adif Putra. 2015. *“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”.* Jurnal Ekonomi Vol. 2 No. 2. Riau University : Pekanbaru.
- <http://padangmedia.com> (di akses tanggal 1 Agustus 2016)
- <http://dpka.padang.go.id> (di akses tanggal 1 Agustus 2016)
- <http://padang.go.id> (di akses tanggal 2 Agustus 2016)